



BUPATI TANAH LAUT

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

**PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 121 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat:**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

- Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 114), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
23. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
24. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 211);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

27. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2007 Nomor 2);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanah Laut 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 11);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 2);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 Nomor 9);
35. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 Nomor 53);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, ditetapkan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
- (2) APBD Tahun Anggaran 2022 terdiri atas:
 - a. Pendapatan Daerah;
 - b. Belanja Daerah; dan
 - c. Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp1.494.508.572.035,00 (satu triliun empat ratus sembilan puluh empat miliar lima ratus delapan juta lima ratus tujuh puluh dua ribu tiga puluh lima rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp168.281.561.435,00 (seratus enam puluh delapan miliar dua ratus delapan puluh satu juta lima ratus enam puluh satu ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp36.575.000.000,00 (tiga puluh enam miliar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.936.345.500,00 (tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta tiga ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp14.626.000.000,00 (empat belas miliar enam ratus dua puluh enam juta rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp109.144.215.935,00 (seratus sembilan miliar seratus empat puluh empat juta dua ratus lima belas ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp36.575.000.000,00 (tiga puluh enam miliar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Parkir;

- g. Pajak Air Tanah;
 - h. Pajak Sarang Burung Walet;
 - i. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2); dan
 - k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).
 - (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.150.000.000,00 (empat miliar seratus lima puluh juta rupiah).
 - (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
 - (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp475.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
 - (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp20.550.000.000,00 (dua puluh miliar lima ratus lima puluh juta rupiah).
 - (7) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).
 - (8) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
 - (9) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
 - (10) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah).
 - (11) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah).
 - (12) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp4.700.000.000,00 (empat miliar tujuh ratus juta rupiah).

Pasal 6

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp7.936.345.500,00 (tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta tiga ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.793.446.000,00 (dua miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah).

- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.726.471.000,00 (tiga miliar tujuh ratus dua puluh enam juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).
- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.416.428.500,00 (satu miliar empat ratus enam belas juta empat ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

Pasal 7

- (1) Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp14.626.000.000,00 (empat belas miliar enam ratus dua puluh enam juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN; dan
 - b. bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD.
- (2) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp14.500.000.000,00 (empat belas miliar lima ratus juta rupiah).
- (3) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp126.000.000,00 (seratus dua puluh enam juta rupiah).

Pasal 8

- (1) Anggaran Lain-lain PAD yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp109.144.215.935,00 (seratus sembilan miliar seratus empat puluh empat juta dua ratus lima belas ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan;
 - b. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan;
 - c. Jasa Giro;
 - d. Pendapatan Bunga; dan
 - e. Pendapatan BLUD.
- (2) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah).
- (4) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah).
- (5) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

- (6) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 86.879.215.935,00 (delapan puluh enam miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus lima belas ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah).

Pasal 9

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.326.227.010.600,00 (satu triliun tiga ratus dua puluh enam miliar dua ratus dua puluh tujuh juta sepuluh ribu enam ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.215.977.010.600,00 (satu triliun dua ratus lima belas miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta sepuluh ribu enam ratus rupiah).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp110.250.000.000,00 (seratus sepuluh miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 10

- (1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a direncanakan sebesar Rp1.215.977.010.600,00 (satu triliun dua ratus lima belas miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta sepuluh ribu enam ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Dana Perimbangan;
 - b. Dana Insentif Daerah (DID); dan
 - c. Dana Desa.
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.101.300.294.600,00 (satu triliun seratus satu miliar tiga ratus dua puluh sembilan puluh empat ribu enam ratus rupiah).
- (3) Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.342.946.000,00 (sepuluh miliar tiga ratus empat puluh dua juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah).
- (4) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp104.333.770.000,00 (seratus empat miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Pasal 11

- (1) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b direncanakan sebesar Rp110.250.000.000,00 (seratus sepuluh miliar dua ratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Bagi Hasil.

- (2) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp110.250.000.000,00 (seratus sepuluh miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 12

- (1) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas:
- a. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 13

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp1.635.547.777.496,00 (satu triliun enam ratus tiga puluh lima miliar lima ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

Pasal 14

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp1.201.672.073.029,00 (satu triliun dua ratus satu miliar enam ratus tujuh puluh dua juta tujuh puluh tiga ribu dua puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Hibah; dan
 - d. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp668.901.001.097,00 (enam ratus enam puluh delapan miliar sembilan ratus satu juta seribu sembilan puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp483.300.050.395,00 (empat ratus delapan puluh tiga miliar tiga ratus juta lima puluh ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah).
- (4) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp37.206.221.537,00 (tiga puluh tujuh miliar dua ratus enam juta dua ratus dua puluh satu ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah).

- (5) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp12.264.800.000,00 (dua belas miliar dua ratus enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah).

Pasal 15

- (1) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp668.901.001.097,00 (enam ratus enam puluh delapan miliar sembilan ratus satu juta seribu sembilan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
- Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
 - Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
 - Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
 - Belanja Pegawai BOS; dan
 - Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp426.392.571.773,00 (empat ratus dua puluh enam miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta lima ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp203.295.440.353,00 (dua ratus tiga miliar dua ratus sembilan puluh lima juta empat ratus empat puluh ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.471.981.129,00 (satu miliar empat ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu seratus dua puluh sembilan rupiah).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp24.443.872.220,00 (dua puluh empat miliar empat ratus empat puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus dua puluh rupiah).
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp755.022.322,00 (tujuh ratus lima puluh lima juta dua puluh dua ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah).
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp912.480.000,00 (sembilan ratus dua belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (8) Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp5.204.883.300,00 (lima miliar dua ratus empat empat juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus rupiah).

- (9) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp6.424.750.000,00 (enam miliar empat ratus dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 16

- (1) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp483.300.050.395,00 (empat ratus delapan puluh tiga miliar tiga ratus juta lima puluh ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belana Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOS; dan
 - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp50.418.076.763,00 (lima puluh miliar empat ratus delapan belas juta tujuh puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp233.003.193.335,00 (dua ratus tiga puluh tiga miliar tiga juta seratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp64.347.239.112,00 (enam puluh empat miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu seratus dua belas rupiah).
- (5) Belana Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp38.383.655.702,00 (tiga puluh delapan miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta enam ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus dua rupiah).
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.080.700.000,00 (empat miliar delapan puluh juta tujuh ratus ribu rupiah).
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp28.334.013.864,00 (dua puluh delapan miliar tiga ratus tiga puluh empat juta tiga belas ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah).
- (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp64.733.171.619,00 (enam puluh empat miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta seratus tujuh puluh satu ribu enam ratus sembilan belas rupiah).

Pasal 17

- (1) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp37.206.221.537,00 (tiga puluh tujuh miliar dua ratus enam juta dua ratus dua puluh satu ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia; dan
 - c. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.243.600.020,00 (tiga miliar dua ratus empat puluh tiga juta enam ratus ribu dua puluh rupiah).
- (3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp32.497.922.967,00 (tiga puluh dua miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah).
- (4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.464.698.550,00 (satu miliar empat ratus enam puluh empat juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus lima puluh rupiah).

Pasal 18

- (1) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp12.264.800.000,00 (dua belas miliar dua ratus enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu; dan
 - b. Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu.
- (2) Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp9.250.040.000,00 (sembilan miliar dua ratus lima puluh juta empat puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.014.760.000,00 (tiga miliar empat belas juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).

Pasal 19

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp187.422.954.350,00 (seratus delapan puluh tujuh miliar empat ratus dua puluh dua juta sembilan ratus lima puluh empat ribu tiga ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;

- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
 - (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp20.512.561.708,00 (dua puluh miliar lima ratus dua belas juta lima ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus delapan rupiah).
 - (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp51.563.555.709,00 (lima puluh satu miliar lima ratus enam puluh tiga juta lima ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus sembilan rupiah).
 - (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp115.041.250.107,00 (seratus lima belas miliar empat puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu seratus tujuh rupiah).
 - (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp285.586.826,00 (dua ratus delapan puluh lima juta lima ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah).

Pasal 20

- (1) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Pasal 21

- (1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp20.512.561.708,00 (dua puluh miliar lima ratus dua belas juta lima ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Besar;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
 - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
 - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
 - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
 - i. Belanja Modal Komputer;
 - j. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
 - k. Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi

- l. Belanja Modal Rambu-Rambu;
 - m. Belanja Modal Peralatan Olahraga;
 - n. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS; dan
 - o. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.221.360.638,00 (tiga miliar dua ratus dua puluh satu juta tiga ratus enam puluh ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah).
 - (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp342.017.792,00 (tiga ratus empat puluh dua juta tujuh belas ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah).
 - (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp130.345.259,00 (seratus tiga puluh juta tiga ratus empat puluh lima ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah).
 - (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp4.094.415,00 (empat juta sembilan puluh empat ribu empat ratus lima belas rupiah).
 - (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.502.926.073,00 (satu miliar lima ratus dua juta sembilan ratus dua puluh enam ribu tujuh puluh tiga rupiah).
 - (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp159.011.850,00 (seratus lima puluh sembilan juta sebelas ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
 - (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp4.671.393.388,00 (empat miliar enam ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah).
 - (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.000.172.534,00 (satu miliar seratus tujuh puluh dua ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah).
 - (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp800.036.512,00 (delapan ratus juta tiga puluh enam ribu lima ratus dua belas rupiah).
 - (11) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp210.239.425,00 (dua ratus sepuluh juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh lima rupiah).
 - (12) Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp22.134.338,00 (dua puluh dua juta seratus tiga puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah).
 - (13) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp25.663.000,00 (dua puluh lima juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah).

- (14) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah).
- (15) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp3.461.102.836,00 (tiga miliar empat ratus enam puluh satu juta seratus dua ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah).
- (16) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp4.940.063.648,00 (empat miliar sembilan ratus empat puluh juta enam puluh tiga ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah).

Pasal 22

- (1) Belanja Modal Gedung Dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp51.563.555.709,00 (lima puluh satu miliar lima ratus enam puluh tiga juta lima ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
 - b. Belanja Modal Monumen;
 - c. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti; dan
 - d. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp48.355.077.709,00 (empat puluh delapan miliar tiga ratus lima puluh lima juta tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan rupiah).
- (3) Belanja Modal Monumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp199.320.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.969.158.000,00 (satu miliar sembilan ratus enam puluh sembilan juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah).
- (5) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.040.000.000,00 (satu miliar empat puluh juta rupiah).

Pasal 23

- (1) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp115.041.250.107,00 (seratus lima belas miliar empat puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu seratus tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - b. Belanja Modal Bangunan Air;
 - c. Belanja Modal Instalasi; dan
 - d. Belanja Modal Jaringan.

- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 66.145.194.981,00 (enam puluh enam miliar seratus empat puluh lima juta seratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp35.842.055.134,00 (tiga puluh lima miliar delapan ratus empat puluh dua juta lima puluh lima ribu seratus tiga puluh empat rupiah).
- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- (5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp10.553.999.992,00 (sepuluh miliar lima ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah).

Pasal 24

- (1) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1) huruf e sebesar Rp285.586.826,00 (dua ratus delapan puluh lima juta lima ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud.
- (2) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp285.586.826,00 (dua ratus delapan puluh lima juta lima ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah).

Pasal 25

- (1) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c direncanakan sebesar Rp22.626.879.377,00 (dua puluh dua miliar enam ratus dua puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Tidak Terduga.
- (2) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp22.626.879.377,00 (dua puluh dua miliar enam ratus dua puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

Pasal 26

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d direncanakan sebesar Rp223.825.870.740,00 (dua ratus dua puluh tiga miliar delapan ratus dua puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus empat puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bagi Hasil; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.

- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.451.134.550,00 (empat miliar empat ratus lima puluh satu juta seratus tiga puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp219.374.736.190,00 (dua ratus sembilan belas miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu seratus sembilan puluh rupiah).

Pasal 27

- (1) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.451.134.550,00 (empat miliar empat ratus lima puluh satu juta seratus tiga puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa; dan
 - b. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa.
- (2) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.657.500.000,00 (tiga miliar enam ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp793.634.550,00 (tujuh ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus tiga puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah).

Pasal 28

- (1) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp219.374.736.190,00 (dua ratus sembilan belas miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu seratus sembilan puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.
- (2) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp219.374.736.190,00 (dua ratus sembilan belas miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu seratus sembilan puluh rupiah).

Pasal 29

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp389.668.194.461,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan miliar enam

ratus enam puluh delapan juta seratus sembilan puluh empat ribu empat ratus enam puluh satu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 30

- (1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a direncanakan sebesar Rp439.668.194.461,00 (empat ratus tiga puluh sembilan miliar enam ratus enam puluh delapan juta seratus sembilan puluh empat ribu empat ratus enam puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pelampauan Penerimaan PAD;
 - b. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer;
 - c. Penghematan Belanja; dan
 - d. Sisa Belanja Lainnya.
- (2) Pelampauan Penerimaan PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp16.579.333.649,00 (enam belas miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah).
- (3) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp97.081.624.780,00 (sembilan puluh tujuh miliar delapan puluh satu juta enam ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah);
- (4) Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp306.853.240.917,00 (tiga ratus enam miliar delapan ratus lima puluh tiga juta dua ratus empat puluh ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah).
- (5) Sisa Belanja Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp13.153.995.115,00 (tiga belas miliar seratus lima puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu seratus lima belas rupiah).

Pasal 31

- (1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b direncanakan sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pembentukan dana cadangan; dan
 - b. pemberian pinjaman daerah kepada BUMD.
- (2) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah).
- (3) Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 32

- (1) Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp(141.039.205.461,00) (minus seratus empat puluh satu miliar tiga puluh sembilan juta dua ratus lima ribu empat ratus enam puluh satu rupiah);
- (2) Pembiayaan Neto yang merupakan selisih Penerimaan Pembiayaan terhadap Pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar Rp389.668.194.461,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan miliar enam ratus enam puluh delapan juta seratus sembilan puluh empat ribu empat ratus enam puluh satu rupiah).

Pasal 33

Uraian lebih lanjut mengenai Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, yang terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah.
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial.
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus.
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil.
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH- Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 34

Pelaksanaan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini, dituangkan lebih lanjut dalam DPA-SKPD berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelayhari
pada tanggal 31 Desember 2021



Diundangkan di Pelayhari
pada tanggal 31 Desember 2021



BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2021 NOMOR 121

Lampiran I : Peraturan Bupati Tanah Laut
 Nomor : Tahun 2021
 Tanggal : 31 Desember 2021

KABUPATEN TANAH LAUT
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	168.281.561.435
4.1.01	Pajak Daerah	36.575.000.000
4.1.01.06	Pajak Hotel	70.000.000
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	70.000.000
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	70.000.000
4.1.01.07	Pajak Restoran	4.150.000.000
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	150.000.000
4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	150.000.000
4.1.01.07.07	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	4.000.000.000
4.1.01.07.07.0001	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	4.000.000.000
4.1.01.08	Pajak Hiburan	100.000.000
4.1.01.08.02	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	100.000.000
4.1.01.08.02.0001	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	100.000.000
4.1.01.09	Pajak Reklame	475.000.000
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	385.000.000
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	385.000.000
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	84.500.000
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	84.500.000
4.1.01.09.05	Pajak Reklame Berjalan	5.500.000
4.1.01.09.05.0001	Pajak Reklame Berjalan	5.500.000
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	20.550.000.000
4.1.01.10.01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	20.500.000.000
4.1.01.10.01.0001	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	20.500.000.000
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	50.000.000
4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	50.000.000
4.1.01.11	Pajak Parkir	70.000.000
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	70.000.000
4.1.01.11.01.0001	Pajak Parkir	70.000.000
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	1.000.000.000
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	1.000.000.000
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	1.000.000.000
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	60.000.000
4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	60.000.000
4.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet	60.000.000
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	900.000.000
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	900.000.000
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	900.000.000
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	4.500.000.000
4.1.01.15.01	PBBP2	4.500.000.000
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	4.500.000.000
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	4.700.000.000
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	2.700.000.000

Lampiran I : Peraturan Bupati Tanah Laut
 Nomor : Tahun 2021
 Tanggal : 31 Desember 2021

KABUPATEN TANAH LAUT
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	168.281.561.435
4.1.01	Pajak Daerah	36.575.000.000
4.1.01.06	Pajak Hotel	70.000.000
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	70.000.000
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	70.000.000
4.1.01.07	Pajak Restoran	4.150.000.000
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	150.000.000
4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	150.000.000
4.1.01.07.07	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	4.000.000.000
4.1.01.07.07.0001	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	4.000.000.000
4.1.01.08	Pajak Hiburan	100.000.000
4.1.01.08.02	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	100.000.000
4.1.01.08.02.0001	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	100.000.000
4.1.01.09	Pajak Reklame	475.000.000
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	385.000.000
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	385.000.000
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	84.500.000
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	84.500.000
4.1.01.09.05	Pajak Reklame Berjalan	5.500.000
4.1.01.09.05.0001	Pajak Reklame Berjalan	5.500.000
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	20.550.000.000
4.1.01.10.01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	20.500.000.000
4.1.01.10.01.0001	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	20.500.000.000
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	50.000.000
4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	50.000.000
4.1.01.11	Pajak Parkir	70.000.000
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	70.000.000
4.1.01.11.01.0001	Pajak Parkir	70.000.000
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	1.000.000.000
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	1.000.000.000
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	1.000.000.000
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	60.000.000
4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	60.000.000
4.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet	60.000.000
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	900.000.000
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	900.000.000
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	900.000.000
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	4.500.000.000
4.1.01.15.01	PBBP2	4.500.000.000
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	4.500.000.000
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	4.700.000.000
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	2.700.000.000

KABUPATEN TANAH LAUT
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	2.700.000.000
4.1.01.16.02	BPHTB-Pemberian Hak Baru	2.000.000.000
4.1.01.16.02.0001	BPHTB-Pemberian Hak Baru	2.000.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	7.936.345.500
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	2.793.446.000
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	375.650.000
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	375.650.000
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	25.000.000
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	25.000.000
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	1.089.200.000
4.1.02.01.05.0001	Retribusi Pelataran	661.760.000
4.1.02.01.05.0002	Retribusi Los	184.812.000
4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	242.628.000
4.1.02.01.06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	437.740.000
4.1.02.01.06.0001	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	437.740.000
4.1.02.01.09	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	10.800.000
4.1.02.01.09.0001	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	10.800.000
4.1.02.01.11	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	300.000.000
4.1.02.01.11.0001	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	300.000.000
4.1.02.01.13	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	555.056.000
4.1.02.01.13.0001	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	555.056.000
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	3.726.471.000
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.469.570.000
4.1.02.02.01.0003	Retribusi Penyewaan Bangunan	568.714.000
4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	422.250.000
4.1.02.02.01.0005	Retribusi Pemakaian Ruangan	82.246.000
4.1.02.02.01.0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	84.610.000
4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	311.750.000
4.1.02.02.02	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	238.800.000
4.1.02.02.02.0002	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	238.800.000
4.1.02.02.04	Retribusi Terminal	85.000.000
4.1.02.02.04.0003	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	85.000.000
4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	382.526.000
4.1.02.02.05.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	382.526.000
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	61.200.000
4.1.02.02.07.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	61.200.000
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	1.489.375.000
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	1.489.375.000
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	1.416.428.500
4.1.02.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1.416.428.500
4.1.02.03.01.0001	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	1.416.428.500
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	14.626.000.000
4.1.03.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	14.500.000.000

KABUPATEN TANAH LAUT
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.03.01.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	14.500.000.000
4.1.03.01.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	14.500.000.000
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	126.000.000
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	126.000.000
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	126.000.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	109.144.215.935
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	50.000.000
4.1.04.01.06	Hasil Penjualan Aset Lainnya	50.000.000
4.1.04.01.06.0002	Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain	50.000.000
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	215.000.000
4.1.04.03.01	Hasil Sewa BMD	140.000.000
4.1.04.03.01.0001	Hasil Sewa BMD	140.000.000
4.1.04.03.02	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	75.000.000
4.1.04.03.02.0001	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	75.000.000
4.1.04.05	Jasa Giro	7.000.000.000
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	6.820.000.000
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	6.820.000.000
4.1.04.05.02	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	180.000.000
4.1.04.05.02.0001	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	180.000.000
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	15.000.000.000
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	15.000.000.000
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	15.000.000.000
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	86.879.215.935
4.1.04.16.01	Pendapatan BLUD	86.879.215.935
4.1.04.16.01.0001	Pendapatan BLUD	86.879.215.935
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.326.227.010.600
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.215.977.010.600
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1.101.300.294.600
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	331.707.805.600
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	21.018.308.000
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	7.761.120.800
4.2.01.01.01.0005	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	62.010.400
4.2.01.01.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	301.198.272.000
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	133.033.600
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.535.060.800
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	494.306.446.000
4.2.01.01.02.0001	DAU	494.306.446.000
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	99.189.613.000
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	200.000.000
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	9.592.503.000

KABUPATEN TANAH LAUT
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	1.868.130.000
4.2.01.01.03.0006	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	211.182.000
4.2.01.01.03.0011	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	199.921.000
4.2.01.01.03.0013	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	1.098.571.000
4.2.01.01.03.0014	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan	20.989.473.000
4.2.01.01.03.0015	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	3.958.663.000
4.2.01.01.03.0018	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	322.768.000
4.2.01.01.03.0025	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	1.320.116.000
4.2.01.01.03.0026	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan Stunting (KB)	99.149.000
4.2.01.01.03.0027	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya	5.977.024.000
4.2.01.01.03.0031	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	5.929.084.000
4.2.01.01.03.0032	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	430.000.000
4.2.01.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	11.177.440.000
4.2.01.01.03.0035	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	16.838.902.000
4.2.01.01.03.0037	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	11.196.658.000
4.2.01.01.03.0040	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	1.950.000.000
4.2.01.01.03.0043	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	4.530.029.000
4.2.01.01.03.0045	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup	1.300.000.000
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	176.096.430.000
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	41.824.800.000
4.2.01.01.04.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	1.440.000.000
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	96.698.212.000
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1.572.000.000
4.2.01.01.04.0006	DAK Non Fisik-TKG PNSD	1.088.648.000
4.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	7.908.000.000
4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	1.600.100.000
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	5.929.880.000
4.2.01.01.04.0013	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	15.650.774.000
4.2.01.01.04.0014	DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan	400.743.000
4.2.01.01.04.0016	DAK Non Fisik-PK2UKM	404.200.000
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	383.914.000
4.2.01.01.04.0021	DAK Non Fisik-BOKB-KB	605.259.000
4.2.01.01.04.0022	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	451.800.000
4.2.01.01.04.0023	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	138.100.000
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	10.342.946.000
4.2.01.02.01	DID	10.342.946.000
4.2.01.02.01.0001	DID	10.342.946.000
4.2.01.05	Dana Desa	104.333.770.000
4.2.01.05.01	Dana Desa	104.333.770.000
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	104.333.770.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	110.250.000.000
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	110.250.000.000

KABUPATEN TANAH LAUT
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	110.250.000.000
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	12.000.000.000
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	10.000.000.000
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	74.000.000.000
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	1.250.000.000
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	13.000.000.000
	Jumlah Pendapatan	1.494.508.572.035
5	BELANJA	
5.1	BELANJA OPERASI	1.201.672.073.029
5.1.01	Belanja Pegawai	668.901.001.097
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	426.392.571.773
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	293.589.021.110
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	274.372.954.478
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	19.216.066.632
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	29.546.722.982
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	26.200.898.855
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	3.345.824.127
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	8.749.794.804
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	8.749.794.804
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	22.864.690.930
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	20.737.977.880
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	2.126.713.050
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	2.747.678.787
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	2.530.676.001
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	217.002.786
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	17.082.496.629
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	15.224.985.665
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	1.857.510.964
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	785.669.782
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	785.669.782
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	15.054.458
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	14.164.299
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	890.159
5.1.01.01.09	Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN	39.425.603.247
5.1.01.01.09.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	38.059.020.089
5.1.01.01.09.0002	Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK	1.366.583.158
5.1.01.01.10	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	2.234.062.361
5.1.01.01.10.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.152.067.372
5.1.01.01.10.0002	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	81.994.989
5.1.01.01.11	Belanja luran Jaminan Kematian ASN	6.699.471.421
5.1.01.01.11.0001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	6.453.486.453
5.1.01.01.11.0002	Belanja luran Jaminan Kematian PPPK	245.984.968

KABUPATEN TANAH LAUT
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.01.12	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	2.652.305.262
5.1.01.01.12.0001	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	2.450.232.960
5.1.01.01.12.0002	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	202.072.302
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	203.295.440.353
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	195.386.545.669
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	188.334.070.132
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	7.052.475.537
5.1.01.02.02	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	996.000.000
5.1.01.02.02.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS	996.000.000
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	6.912.894.684
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	6.912.894.684
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.471.981.129
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	1.170.400.000
5.1.01.03.01.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	2.240.000
5.1.01.03.01.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	132.800.000
5.1.01.03.01.0008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	3.200.000
5.1.01.03.01.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	15.200.000
5.1.01.03.01.0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	657.600.000
5.1.01.03.01.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	2.240.000
5.1.01.03.01.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	32.000.000
5.1.01.03.01.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	1.920.000
5.1.01.03.01.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	28.800.000
5.1.01.03.01.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	144.000.000
5.1.01.03.01.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	150.400.000
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	301.581.129
5.1.01.03.02.0001	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	0
5.1.01.03.02.0002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	14.274.700
5.1.01.03.02.0004	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	950.000
5.1.01.03.02.0005	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	41.389.600
5.1.01.03.02.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	16.634.120
5.1.01.03.02.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	410.400
5.1.01.03.02.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang	11.400.000
5.1.01.03.02.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	21.092.128
5.1.01.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	52.364.608
5.1.01.03.02.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	9.074.400
5.1.01.03.02.0017	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal	3.230.000

KABUPATEN TANAH LAUT
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.03.02.0018	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	14.460.216
5.1.01.03.02.0020	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	2.325.600
5.1.01.03.02.0022	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	60.151.074
5.1.01.03.02.0025	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan	53.824.283
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	24.443.872.220
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	782.040.000
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	782.040.000
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	109.502.400
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	109.502.400
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	141.943.200
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	141.943.200
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	78.204.000
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	78.204.000
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.133.958.000
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.133.958.000
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	136.629.150
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	136.629.150
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	280.901.250
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	280.901.250
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	6.174.000.000
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	6.174.000.000
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.543.500.000
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.543.500.000
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	350.928.200
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	350.928.200
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	7.456.546.020
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	201.600.000
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	736.840.860
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	92.105.160
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	6.426.000.000
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	6.144.000.000
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	6.144.000.000
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	111.720.000
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	111.720.000
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	755.022.322
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	72.100.000
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	72.100.000
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	14.490.000
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	14.490.000
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	113.400.000
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	113.400.000

KABUPATEN TANAH LAUT
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	7.126.176
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	7.126.176
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	3.080.000
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	3.080.000
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	251.782
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	251.782
5.1.01.05.07	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	8.417.918
5.1.01.05.07.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	8.417.918
5.1.01.05.08	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	505.075
5.1.01.05.08.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	505.075
5.1.01.05.09	Belanja luran Jaminan Kematian KDH/WKDH	1.515.225
5.1.01.05.09.0001	Belanja luran Jaminan Kematian KDH/WKDH	1.515.225
5.1.01.05.10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	438.900.000
5.1.01.05.10.0006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	840.000
5.1.01.05.10.0007	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran	49.800.000
5.1.01.05.10.0008	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan	1.200.000
5.1.01.05.10.0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	5.700.000
5.1.01.05.10.0010	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	246.600.000
5.1.01.05.10.0011	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir	840.000
5.1.01.05.10.0012	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah	12.000.000
5.1.01.05.10.0013	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	720.000
5.1.01.05.10.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	10.800.000
5.1.01.05.10.0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	54.000.000
5.1.01.05.10.0016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	56.400.000
5.1.01.05.11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	95.236.146
5.1.01.05.11.0001	Belanja Insentif Pemungutan bagi KDH/WKDH atas Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	0
5.1.01.05.11.0002	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	4.507.800
5.1.01.05.11.0004	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	300.000
5.1.01.05.11.0005	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	13.070.400
5.1.01.05.11.0006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	5.252.880
5.1.01.05.11.0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kaku	129.600
5.1.01.05.11.0011	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang	3.600.000
5.1.01.05.11.0013	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	6.660.672
5.1.01.05.11.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	16.536.192

KABUPATEN TANAH LAUT
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.05.11.0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	2.865.600
5.1.01.05.11.0017	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal	1.020.000
5.1.01.05.11.0018	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	4.566.384
5.1.01.05.11.0020	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	734.400
5.1.01.05.11.0022	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	18.995.076
5.1.01.05.11.0025	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan	16.997.142
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	912.480.000
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	312.480.000
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	312.480.000
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000
5.1.01.88	Belanja Pegawai BOS	5.204.883.300
5.1.01.88.88	Belanja Pegawai BOS	5.204.883.300
5.1.01.88.88.8888	Belanja Pegawai BOS	5.204.883.300
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	6.424.750.000
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	6.424.750.000
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	6.424.750.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	483.300.050.395
5.1.02.01	Belanja Barang	50.418.076.763
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	50.394.125.368
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	4.917.310.595
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	258.252.296
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.665.998.212
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	1.177.722.373
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	144.423.295
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	460.000
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	13.965.004
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	8.597.105
5.1.02.01.01.0014	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	1.283.150
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	1.285.409.855
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.751.492.330
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.349.783.530
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	59.999.610
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	245.875.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.237.214.106
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	1.226.584.243
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.934.690.202
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	742.192.910
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	428.342.986
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	444.666.596

KABUPATEN TANAH LAUT
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	241.304.685
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	1.659.263.187
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	1.802.538.701
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	963.929.458
5.1.02.01.01.0040	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	30.250.000
5.1.02.01.01.0041	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	94.486.500
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	198.870.939
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.929.333.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.807.810.000
5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	966.474.000
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	7.200.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	9.552.001.500
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	199.100.000
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	19.800.000
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	27.500.000
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	23.951.395
5.1.02.01.02.0012	Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	3.267.017
5.1.02.01.02.0013	Belanja Pipa-Pipa Lainnya	20.684.378
5.1.02.02	Belanja Jasa	233.003.193.335
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	169.732.863.468
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.559.240.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	6.013.797.000
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	40.000.000
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	1.682.500.000
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	133.485.000
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	243.360.000
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	90.000.000
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	44.564.700.000
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	29.259.171.357
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	402.440.000
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	8.603.808.000
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	5.192.700.000
5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	119.000.000
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	85.300.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	25.772.140.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	680.400.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	11.446.566.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	72.000.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	3.272.040.000
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	830.400.000
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	5.270.000

KABUPATEN TANAH LAUT
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	21.329.704
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	128.280.000
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	513.688.300
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	35.500.000
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	162.950.247
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	769.225.250
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	1.836.503.000
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	286.040.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	1.409.241.118
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	17.042.518.655
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	342.603.200
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	4.228.441.498
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	46.000.000
5.1.02.02.01.0066	Belanja Registrasi/Keanggotaan	15.825.139
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	4.000.000
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	290.000.000
5.1.02.02.01.0074	Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Vaksinator	532.400.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	47.410.284.160
5.1.02.02.02.0003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPJ dan BP Kelas 3	37.845.990.000
5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPJ dan BP Kelas 3	3.027.679.200
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	5.623.236.800
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	407.429.600
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	505.948.560
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	121.500.000
5.1.02.02.03.0001	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	1.500.000
5.1.02.02.03.0019	Belanja Sewa Tanah Lapangan Penimbunan Barang	120.000.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	6.036.277.320
5.1.02.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	2.937.480.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	2.394.710.000
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	74.084.000
5.1.02.02.04.0049	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	3.612.000
5.1.02.02.04.0115	Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)	54.000.000
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	240.141.320
5.1.02.02.04.0121	Belanja Sewa Alat Pendingin	17.000.000
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	190.600.000
5.1.02.02.04.0195	Belanja Sewa Sumber Tenaga	101.050.000
5.1.02.02.04.0453	Belanja Sewa Alat Pendukung Pencarian	23.600.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.017.535.700
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	120.000.000
5.1.02.02.05.0025	Belanja Sewa Bangunan Terbuka	480.514.700
5.1.02.02.05.0030	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	191.085.000
5.1.02.02.05.0037	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	67.536.000
5.1.02.02.05.0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	158.400.000

KABUPATEN TANAH LAUT
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	55.100.000
5.1.02.02.07.0031	Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya	800.000
5.1.02.02.07.0057	Belanja Sewa Tanaman	54.300.000
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	2.711.988.899
5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	899.999.100
5.1.02.02.08.0013	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	22.000.000
5.1.02.02.08.0015	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	696.000.000
5.1.02.02.08.0032	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	849.999.899
5.1.02.02.08.0036	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Keairan	243.989.900
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	2.499.999.988
5.1.02.02.09.0004	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Perindustrian dan Perdagangan	99.999.999
5.1.02.02.09.0006	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kuangan	100.000.000
5.1.02.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	1.099.999.989
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	1.200.000.000
5.1.02.02.10	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	49.980.000
5.1.02.02.10.0007	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Persampahan	49.980.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	3.148.213.800
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	426.060.000
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	2.722.153.800
5.1.02.02.13	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	219.450.000
5.1.02.02.13.0006	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	420.000
5.1.02.02.13.0007	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	24.900.000
5.1.02.02.13.0008	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	600.000
5.1.02.02.13.0009	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	2.850.000
5.1.02.02.13.0010	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	123.300.000
5.1.02.02.13.0011	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	420.000
5.1.02.02.13.0012	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	6.000.000
5.1.02.02.13.0013	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	360.000
5.1.02.02.13.0014	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	5.400.000
5.1.02.02.13.0015	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	27.000.000
5.1.02.02.13.0016	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	28.200.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	64.347.239.112
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	11.244.363.798
5.1.02.03.02.0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	549.999.998
5.1.02.03.02.0020	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Feeder	27.500.000
5.1.02.03.02.0023	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	44.660.000
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	3.848.920.000

KABUPATEN TANAH LAUT
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	1.246.698.000
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	1.886.500.000
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1.113.000.000
5.1.02.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	138.900.000
5.1.02.03.02.0049	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	21.500.000
5.1.02.03.02.0055	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus	6.750.000
5.1.02.03.02.0059	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi	22.000.000
5.1.02.03.02.0060	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (Berpindah)	32.000.000
5.1.02.03.02.0064	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Kayu	1.400.000
5.1.02.03.02.0082	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Universal	30.000.000
5.1.02.03.02.0115	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	4.500.000
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	140.895.000
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	10.200.000
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	4.500.000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	482.470.000
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	301.810.000
5.1.02.03.02.0132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	31.557.800
5.1.02.03.02.0138	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	7.000.000
5.1.02.03.02.0148	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya	2.000.000
5.1.02.03.02.0195	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Sumber Tenaga	78.000.000
5.1.02.03.02.0278	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pertanian	1.235.000
5.1.02.03.02.0328	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-System/Power Supply	79.650.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	445.340.000
5.1.02.03.02.0407	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe	208.000.000
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	256.750.000
5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	111.000.000
5.1.02.03.02.0437	Belanja Pemeliharaan Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Eksplorasi-Mekanik	9.000.000
5.1.02.03.02.0453	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat Pendukung Pencarian	7.925.000
5.1.02.03.02.0487	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Heat Generating Equipment	35.000.000

KABUPATEN TANAH LAUT
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.03.02.0494	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	57.703.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	939.624.078
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	841.799.150
5.1.02.03.03.0006	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	9.823.000
5.1.02.03.03.0012	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	60.311.728
5.1.02.03.03.0039	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II	7.700.000
5.1.02.03.03.0040	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III	5.557.200
5.1.02.03.03.0063	Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar	14.433.000
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	52.160.851.236
5.1.02.03.04.0003	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	43.564.850.332
5.1.02.03.04.0020	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Penyeberangan	923.093.256
5.1.02.03.04.0024	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	44.999.999
5.1.02.03.04.0026	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi	5.393.162.381
5.1.02.03.04.0027	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembuang Irigasi	1.259.924.972
5.1.02.03.04.0045	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pelengkap Pengembangan Rawa	599.927.432
5.1.02.03.04.0055	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air	349.892.864
5.1.02.03.04.0087	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya	25.000.000
5.1.02.03.05	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	2.400.000
5.1.02.03.05.0028	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik	2.400.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas	38.383.655.702
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	38.233.655.702
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	29.007.049.202
5.1.02.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	25.000.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9.201.246.500
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	360.000
5.1.02.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	150.000.000
5.1.02.04.02.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa-Luar Negeri	150.000.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.080.700.000
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.030.700.000
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	2.991.700.000
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	1.012.000.000
5.1.02.05.01.0004	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	27.000.000
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	50.000.000
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	50.000.000
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	28.334.013.864
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	28.334.013.864

KABUPATEN TANAH LAUT
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	28.334.013.864
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	64.733.171.619
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	64.733.171.619
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	64.733.171.619
5.1.05	Belanja Hibah	37.206.221.537
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	3.243.600.020
5.1.05.01.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	1.943.600.000
5.1.05.01.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	1.943.600.000
5.1.05.01.02	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	1.300.000.020
5.1.05.01.02.0001	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	1.300.000.020
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	32.497.922.967
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	8.930.000.000
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	8.930.000.000
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	11.226.256.435
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1.412.755.000
5.1.05.05.02.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	9.813.501.435
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	12.341.666.532
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	11.918.229.000
5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	423.437.532
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.464.698.550
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.464.698.550
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.464.698.550
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	12.264.800.000
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	12.264.800.000
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	9.250.040.000
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	9.250.040.000
5.1.06.01.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	3.014.760.000
5.1.06.01.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	3.014.760.000
5.2	BELANJA MODAL	187.422.954.350
5.2.01	Belanja Modal Tanah	20.000.000
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	20.000.000
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	20.000.000
5.2.01.01.01.0007	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	20.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.512.561.708
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	3.221.360.638
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	1.500.000.000
5.2.02.01.01.0009	Belanja Modal Loader	1.500.000.000

KABUPATEN TANAH LAUT
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	1.721.360.638
5.2.02.01.03.0002	Belanja Modal Feeder	1.650.000.000
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	15.222.825
5.2.02.01.03.0013	Belanja Modal Peralatan Selam	56.137.813
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	342.017.792
5.2.02.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	262.462.492
5.2.02.02.02.0001	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	262.462.492
5.2.02.02.03	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor	79.555.300
5.2.02.02.03.0001	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang	79.555.300
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	130.345.259
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	100.980.115
5.2.02.03.01.0001	Belanja Modal Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi	11.302.500
5.2.02.03.01.0004	Belanja Modal Perkakas Bengkel Service	6.497.615
5.2.02.03.01.0006	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu	83.180.000
5.2.02.03.02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	1.200.000
5.2.02.03.02.0005	Belanja Modal Perkakas Standard (Standard Tools)	1.200.000
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	28.165.144
5.2.02.03.03.0001	Belanja Modal Alat Ukur Universal	28.165.144
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	4.094.415
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	4.094.415
5.2.02.04.01.0002	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	4.094.415
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.502.926.073
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	244.412.880
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	184.947.641
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	59.465.239
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	1.211.475.480
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	539.168.383
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	33.736.336
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	436.748.333
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	14.756.225
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	170.040.727
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	17.025.476
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	47.037.713
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	47.037.713
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	159.011.850
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	76.291.815
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	15.218.159
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	61.073.656
5.2.02.06.03	Belanja Modal Peralatan Pemancar	82.720.035
5.2.02.06.03.0047	Belanja Modal Sumber Tenaga	82.720.035
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	4.671.393.388
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	2.725.870.117
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	1.034.094.191

KABUPATEN TANAH LAUT
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.02.07.01.0004	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah	561.179.237
5.2.02.07.01.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	371.268.066
5.2.02.07.01.0008	Belanja Modal Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	9.429.869
5.2.02.07.01.0019	Belanja Modal Alat Kedokteran Nuklir	158.777.725
5.2.02.07.01.0021	Belanja Modal Alat Kedokteran Gawat Darurat	591.121.029
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	1.945.523.271
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	1.945.523.271
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	1.000.172.534
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	689.372.338
5.2.02.08.01.0011	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	372.113.500
5.2.02.08.01.0012	Belanja Modal Alat Laboratorium Mikrobiologi	243.477.713
5.2.02.08.01.0019	Belanja Modal Alat Laboratorium Farmasi	73.781.125
5.2.02.08.04	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	48.791.196
5.2.02.08.04.0005	Belanja Modal System/Power Supply	48.791.196
5.2.02.08.07	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	152.009.000
5.2.02.08.07.0002	Belanja Modal Alat Laboratorium Kualitas Udara	152.009.000
5.2.02.08.09	Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	110.000.000
5.2.02.08.09.0002	Belanja Modal Alat Laboratorium Standar dan Kalibrator	110.000.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	800.036.512
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	594.229.746
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	594.229.746
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	205.806.766
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	137.799.816
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	68.006.950
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	210.239.425
5.2.02.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung	69.734.500
5.2.02.15.02.0003	Belanja Modal Topi Kerja	69.734.500
5.2.02.15.03	Belanja Modal Alat SAR	140.504.925
5.2.02.15.03.0002	Belanja Modal Alat Pendukung Pencarian	140.504.925
5.2.02.17	Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi	22.134.338
5.2.02.17.01	Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi	22.134.338
5.2.02.17.01.0020	Belanja Modal Solid Material Handling Equipment	22.134.338
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	25.663.000
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	25.663.000
5.2.02.18.01.0003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	25.663.000
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	22.000.000
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	22.000.000
5.2.02.19.01.0006	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	22.000.000
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	3.461.102.836
5.2.02.88.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	3.461.102.836
5.2.02.88.88.8888	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	3.461.102.836
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	4.940.063.648
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	4.940.063.648

KABUPATEN TANAH LAUT
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	4.940.063.648
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	51.563.555.709
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	48.355.077.709
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	48.355.077.709
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	20.350.326.391
5.2.03.01.01.0002	Belanja Modal Bangunan Gudang	129.999.983
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	14.279.566.439
5.2.03.01.01.0008	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	401.412.000
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	4.817.991.200
5.2.03.01.01.0011	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	866.296.530
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	7.107.787.866
5.2.03.01.01.0033	Belanja Modal Bangunan Parkir	136.488.000
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	180.000.000
5.2.03.01.01.0037	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	85.209.300
5.2.03.02	Belanja Modal Monumen	199.320.000
5.2.03.02.01	Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	199.320.000
5.2.03.02.01.0003	Belanja Modal Bangunan Peninggalan	199.320.000
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	1.969.158.000
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	1.969.158.000
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	1.969.158.000
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	1.040.000.000
5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	1.040.000.000
5.2.03.99.99.9999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	1.040.000.000
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	115.041.250.107
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	66.145.194.981
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	32.864.110.106
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	26.430.667.198
5.2.04.01.01.0009	Belanja Modal Jalan Khusus	6.433.442.908
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	33.281.084.875
5.2.04.01.02.0003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	31.881.110.795
5.2.04.01.02.0010	Belanja Modal Jembatan Penyeberangan	1.399.974.080
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	35.842.055.134
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	349.994.731
5.2.04.02.01.0004	Belanja Modal Bangunan Pembuang Irigasi	349.994.731
5.2.04.02.03	Belanja Modal Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	199.975.811
5.2.04.02.03.0006	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Pengembangan Rawa	199.975.811
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	9.936.846.472
5.2.04.02.04.0004	Belanja Modal Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	3.447.345.464
5.2.04.02.04.0005	Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	6.489.501.008
5.2.04.02.05	Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	879.145.123
5.2.04.02.05.0001	Belanja Modal Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air	599.897.430
5.2.04.02.05.0002	Belanja Modal Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air	79.872.100
5.2.04.02.05.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air	199.375.593

KABUPATEN TANAH LAUT
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.04.02.06	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	17.713.413.997
5.2.04.02.06.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku	17.713.413.997
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	6.762.679.000
5.2.04.02.07.0003	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	6.762.679.000
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	2.500.000.000
5.2.04.03.01	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	2.500.000.000
5.2.04.03.01.0004	Belanja Modal Instalasi Air Tanah Dangkal	2.500.000.000
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	10.553.999.992
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	10.553.999.992
5.2.04.04.02.0002	Belanja Modal Jaringan Distribusi	10.553.999.992
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	285.586.826
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	285.586.826
5.2.05.08.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	285.586.826
5.2.05.08.01.0005	Belanja Modal Software	285.586.826
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	22.626.879.377
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	22.626.879.377
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	22.626.879.377
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	22.626.879.377
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	22.626.879.377
5.4	BELANJA TRANSFER	223.825.870.740
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	4.451.134.550
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	3.657.500.000
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	3.657.500.000
5.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	3.657.500.000
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	793.634.550
5.4.01.02.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	793.634.550
5.4.01.02.01.0001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	793.634.550
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	219.374.736.190
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	219.374.736.190
5.4.02.05.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	219.374.736.190
5.4.02.05.01.0001	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	219.374.736.190
	Jumlah Belanja	1.635.547.777.496
	Total Surplus/(Defisit)	(141.039.205.461)
6	PEMBIAYAAN	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	439.668.194.461
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	433.668.194.461
6.1.01.01	Pelampauan Penerimaan PAD	16.579.333.649
6.1.01.01.01	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Daerah	7.187.167.865
6.1.01.01.01.0006	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Hotel	6.540.000
6.1.01.01.01.0007	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Restoran	1.228.879.026
6.1.01.01.01.0009	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Reklame	113.647.138
6.1.01.01.01.0010	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Penerangan Jalan	862.652.719

KABUPATEN TANAH LAUT
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
6.1.01.01.01.0012	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Air Tanah	107.416.858
6.1.01.01.01.0014	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	645.775.387
6.1.01.01.01.0015	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	2.541.380.260
6.1.01.01.01.0016	Pelampauan Penerimaan PAD-Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1.680.876.477
6.1.01.01.02	Pelampauan Penerimaan PAD-Retribusi Daerah	880.777.100
6.1.01.01.02.0001	Pelampauan Penerimaan PAD-Retribusi Jasa Umum	431.140.550
6.1.01.01.02.0002	Pelampauan Penerimaan PAD-Retribusi Jasa Usaha	449.636.550
6.1.01.01.04	Pelampauan Penerimaan PAD-Lain-lain PAD yang Sah	8.511.388.684
6.1.01.01.04.0007	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Bunga	3.729.741.561
6.1.01.01.04.0015	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan dari Pengembalian	373.739.203
6.1.01.01.04.0017	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	4.407.907.920
6.1.01.02	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	97.081.624.780
6.1.01.02.01	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat	97.081.624.780
6.1.01.02.01.0002	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Pajak Penghasilan Pasal 21	2.848.991.219
6.1.01.02.01.0009	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Sumber Daya Alam Mineral dan Batu Bara-Royalty	84.893.612.561
6.1.01.02.01.0087	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Insentif Daerah	9.339.021.000
6.1.01.05	Penghematan Belanja	306.853.240.917
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	248.078.181.575
6.1.01.05.01.0001	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN	100.705.675.511
6.1.01.05.01.0002	Penghematan Belanja Pegawai-Tambahan Penghasilan ASN	53.097.996.845
6.1.01.05.01.0006	Penghematan Belanja Pegawai-Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	56.181.818
6.1.01.05.01.0007	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang	47.891.903.328
6.1.01.05.01.0008	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Jasa	16.062.983.285
6.1.01.05.01.0009	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Pemeliharaan	7.768.911.895
6.1.01.05.01.0010	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Perjalanan Dinas	12.493.940.941
6.1.01.05.01.0024	Penghematan Belanja Hibah-Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	7.275.211.952
6.1.01.05.01.0027	Penghematan Belanja Bantuan Sosial-Bantuan Sosial kepada Individu	2.725.376.000
6.1.01.05.02	Penghematan Belanja-Belanja Modal	39.689.730.958
6.1.01.05.02.0001	Penghematan Belanja Modal Tanah-Tanah	526.981.824
6.1.01.05.02.0003	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan	1.916.679.363
6.1.01.05.02.0006	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga	3.154.760.764
6.1.01.05.02.0008	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan	4.668.826.327
6.1.01.05.02.0020	Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung	18.294.600.876
6.1.01.05.02.0024	Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan	11.127.881.804
6.1.01.05.03	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	3.291.182.454
6.1.01.05.03.0001	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	3.291.182.454
6.1.01.05.04	Sisa Belanja Transfer	15.794.145.930

KABUPATEN TANAH LAUT
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
6.1.01.05.04.0006	Sisa Belanja Bantuan Keuangan-Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	15.794.145.930
6.1.01.08	Sisa Belanja Lainnya	13.153.995.115
6.1.01.08.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	13.153.995.115
6.1.01.08.01.0001	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	13.153.995.115
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	6.000.000.000
6.1.05.03	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMD	6.000.000.000
6.1.05.03.01	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMD	6.000.000.000
6.1.05.03.01.0001	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMD	6.000.000.000
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	439.668.194.461
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	50.000.000.000
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	40.000.000.000
6.2.01.01	Pembentukan Dana Cadangan	40.000.000.000
6.2.01.01.01	Pembentukan Dana Cadangan	40.000.000.000
6.2.01.01.01.0001	Pembentukan Dana Cadangan	40.000.000.000
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	10.000.000.000
6.2.04.03	Pemberian Pinjaman Daerah kepada BUMD	10.000.000.000
6.2.04.03.01	Pemberian Pinjaman Daerah kepada BUMD	10.000.000.000
6.2.04.03.01.0001	Pemberian Pinjaman Daerah kepada BUMD	10.000.000.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000.000
	Pembiayaan Netto	389.668.194.461



Bupati Tanah Laut

H. SUKAMTA